
**OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK
DAPIL II ACEH BARAT**

**Haris Munanda, Effendi Hasan
(haris.munanda20@gmail.com)**

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Unsyiah

ABSTRAK

Salah satu program yang menarik dari tugas dan wewenang DPRK adalah Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi. Dana aspirasi DPRK ini bila dianalisa sangat mirip dengan 'pork barrel budget' di Amerika Serikat (AS). Dana aspirasi DPRK tidak lain adalah politik *pork barrel* untuk menjaga *status quo* anggota DPRK dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang negara. Dana yang diusulkan dapat disebut dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Dana aspirasi yang diterima oleh setiap anggota dewan perlu dioptimalisasi supaya bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif memberikan kesempatan berekspresi dan penjejelasan yang lebih besar. Dana aspirasi Tahun 2015 anggota DPRK Dapil II Aceh Barat sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur umum di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bubon dan Kecamatan Arongan Lambalek. Adapun pembangunan infrastruktur yang dibuat adalah drainase, membuat pagar masjid, tempat wudhu, lapangan bola, serta pelebaran jalan. Masih ditemukannya kendala dalam mengoptimalkan dana aspirasi di DPRK Dapil II Aceh Barat. Adapun kendalanya adalah; penyaluran pembangunan dari dana aspirasi tidak merata di semua kecamatan yang ada di Dapil II. Dari tiga kecamatan yang termasuk dalam Dapil II hanya Kecamatan Bubon dan Arongan Lambalek yang mendapatkan bantuan berupa pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya data yang dimiliki oleh pengambil kebijakan, pembebasan lahan warga untuk pembangunan, serta masa waktu kerja yang sedikit. Peneliti mengharapkan pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan untuk kemajuan dan kelancaran aktivitas warga sehari-hari, akan tetapi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah Dapil II juga harus diperhatikan, perlu

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT**
(Haris Munanda, Effendi Hasan)

kiranya dibuat sebuah pelatihan skill dan ekonomi mandiri warga untuk meningkatkan pembangunan. Dalam membuat perencanaan pembangunan diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi administrasi seperti perizinan lahan, data lokasi pembangunan, peraturan yang baru, dan lain-lain ataupun dari segi operasional, seperti waktu yang dibutuhkan, bahan yang diperlukan dan lain-lain sehingga pembangunan tepat waktu dan lebih cepat selesai.

Kata Kunci: Optimalisasi dan Dana Aspirasi

ABSTRACT

One very interesting program authorized to Local Senator is developing the Vote Polling Place Program (UP2DP) or what most call Aspiration Funds. This aspiration fund by DPRK is like the “pork barrel budget” in The United States. The aspiration fund is actually the pork barrel politics to protect the status quo of DPRK senates by paying back the expenses of campaign and voters voting using state budget. It is called the aspiration funds because it actually supports the public aspirations. The funds accepted by the senates should be used optimally for the citizens sake. This study used qualitative research method with the descriptive approach. This method allows researcher to explore and more elaborate. The study shows that from aspiration fund in 2015 of vote polling Area II, west Aceh has been used for building public infrastructure in two sub-districts which are sub-district Bubon and Arongan Lambalek. The public infrastructures which were built are drainage, mosque fence, abolition place, football field, and also road expansion. However, there are still some obstacles in optimazing this aspiration fund West Aceh. The obstacles are the uneven distribution of aspiration fund in all sub districts in Vote Polling Place II West Aceh. From three sub-districts, only two sub-districts, Bubon Sub-district and Arongan Sub-district, received the infrastructures improvement aids from this aspiration fund. It is caused by the insufficient data gathered by the stakeholders, the insufficient lot for development served by the society in the place, and the limited tie provided. The researcher exects the infrastructure development is conducted for the sake of effectiveness of public activities. However, researcher believed that the human resources of the Vote Polling Place

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT**
(Haris Munanda, Effendi Hasan)

should be the concern too. The community skills training and entrepreneurs training should be suggested too for development. Thus the development planning is important especially in lot authorization, lot location data, the new regulations appropriation and such operational points as the timing, tools, and etc., so that the construction finishes on time.

Keywords: *Optimization, Aspiration funds*

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (disingkat DPRA) adalah dewan perwakilan rakyat daerah pada Provinsi Aceh. Berbeda dengan DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, lembaga ini memiliki nama yang unik, serta memiliki jumlah anggota $1\frac{1}{4}$ kali lebih banyak dari DPRD provinsi menurut undang-undang. DPRA memiliki tugas dan wewenang; Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerjasama internasional.

Fungsi lainnya adalah Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Memberitahukan kepada gubernur dan Komisi Independen Pemilihan tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerjasama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT**
(Haris Munanda, Effendi Hasan)

kinerja pemerintahan. Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Salah satu program yang menarik dari tugas dan wewenang DPRK adalah Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi. Dana aspirasi DPRK ini bila dianalisa sangat mirip dengan 'pork barrel budget' di Amerika Serikat (AS). Dana aspirasi DPRK tidak lain adalah politik *pork barrel* untuk menjaga status sementara anggota DPRK dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang negara. Dana yang diusulkan dapat disebut dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Wakil rakyat memang sudah mendapat inspirasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi konstituennya. Sejalan dengan politik pencitraan maka aspirasi rakyat adalah yang paling kuat untuk menjadi alasan usulan tersebut. Dana yang diusulkan dapat disebut dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi wakil rakyat dalam memecahkan persoalan rakyat (Saiful, 2015: 06).

Tujuan dari adanya dana aspirasi dalam Anggaran Pendapatan belanja Aceh (APBA) bukan semata-mata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, namun dana aspirasi juga menjadi salah satu strategi untuk memuluskan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2015 dalam percepatan penyusunan RAPBA 2015, masing-masing anggota DPR Aceh diberikan kuota anggaran untuk mengusul berbagai program dan kegiatan dari daerah pemilihan senilai Rp 5 miliar/anggota.

Khusus kuota jajaran pimpinan sebesar Rp 7 miliar/orang. Artinya, dari 81 anggota DPR Aceh periode 2014-2019, akan ada usulan program dana aspirasi baru dari masyarakat daerah pemilihan yang akan dimasukkan kedalam dokumen KUA dan PPAS 2015 senilai Rp. 405 miliar dari total pagu KUA dan PPAS 2015 yang di usul gubernur kepada DPR Aceh senilai Rp 11,6 triliun. Pada tahun 2016 ini, anggaran untuk dana aspirasi di jajaran DPRA meningkat menjadi Rp 885 Miliar. Dengan rincian setiap anggota DPRA dijatahi 10 Milyar dan masing-masing Wakil Pimpinan DPRA sebanyak 25 Milyar (Amar, 2016: 13).

Berdasarkan data awal dari Gerak Aceh Barat dana aspirasi anggota DPRK Aceh Barat sebesar Rp 50 Milyar pada tahun 2016 ini yang

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT**
(Haris Munanda, Effendi Hasan)

dibagikan kepada 25 anggota dewan. Dana ini meningkat 17% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 35 Milyar. Peningkatan dana aspirasi dari tahun 2015 sebelumnya menjadi sebuah masalah, dikarenakan dana aspirasi tahun 2015 sebelumnya yang tidak tepat sasaran dan tidak digunakan untuk keperluan umum (Raka: 2016: 16).

Adapun alur penyaluran dana aspirasi disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang penggunaannya tidak dikelola langsung oleh anggota DPRK, melainkan dititipkan di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sebagai mitra kerja anggota Dewan. Dapil II (Arongan, Samatiga, Dan Bubon) memiliki jatah 4 kursi di DPRK Aceh Barat, setiap kursi dialokasikan dana 2 milyar, sehingga jumlah dana aspirasi yang diterima oleh anggota DPRK Dapil II berjumlah 8 Milyar pada tahun ini.

Dana aspirasi yang diterima oleh setiap anggota dewan perlu dioptimalisasi supaya bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Kesimpulan sementara peneliti saat ini adalah masyarakat yang terdapat di Dapil II Aceh Barat sampai saat ini masih kurang merasakan dampak dari program yang dilakukan oleh anggota DPRK dengan dana aspirasi, terlebih-lebih dana yang begitu tertutup untuk diakses oleh masyarakat. Dikhawatirkan dana besar yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat disalahgunakan, dan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja.

Bagi anggota badan legislatif ini adalah kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan beraneka ragam pandangan yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat. Dengan demikian jarak antara yang memerintah dan yang diperintah dapat diperkecil. Dipihak lain, pembahasan kebijaksanaan pemerintah dimuka umum merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan tindakan-tindakan dan rencananya.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan teoritis landasan teori, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.

1. Politik Anggaran

OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT
(Haris Munanda, Effendi Hasan)

Penganggaran pada sektor publik merupakan bagian dari ruang lingkup administrasi publik, dengan disertai beberapa karakteristik sesuai dengan pendekatan, fungsi, formasi, dan tipenya. Selanjutnya anggaran dapat dilihat berdasarkan empat perspektif menurut R Smith dan Thomas D. Lynch yaitu: (1) berdasarkan perspektif politik anggaran adalah peristiwa politik sebagai hasil dari ranah politik selanjutnya diperoleh keuntungan politik; (2) berdasarkan perspektif ekonomi, anggaran dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan; (3) berdasarkan perspektif akuntan, nilai akuntabilitas penganggaran mencerminkan suatu kebijakan; (4) berdasarkan manajemen publik, anggaran merupakan alat kebijakan yang menjelaskan implementasi dari kebijakan publik tersebut.

Selanjutnya RW Smith dan Thomas juga menambahkan anggaran memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah instrument politik yang terhubung dengan sektor publik. Fungsi tersebut menjadikan anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan. Pemenuhan prioritas-prioritas pada sektor publik, membutuhkan *political skill, coalition building, negotiation skill* dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh penyusun anggaran.

Apabila dilihat dari fungsinya, sebagai alat politik pemerintah, anggaran dapat digunakan sebagai sarana kekuatan politik untuk mencapai tujuan dan aspirasi politik. Hal ini dimungkinkan karena anggaran merupakan produk, titik temu dari pembahasan antara pemerintah dan anggota dewan. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran dilakukan secara sistematis, dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu dan melalui penyusunan rencana dan program yang dituangkan ke dalam nilai mata uang, penganggaran juga diharuskan mempunyai prinsip keadilan, efesiansi dan efektifitas anggaran, prinsip keberimbangan, dinamis, disiplin, serta transparansi dan akuntabilitas.

2. Konsep Kekuasaan

Ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan di manapun kekuasaan itu ditemukan. Telah muncul begitu banyak beberapa ahli yang menjelaskan pengertian kekuasaan. W.Connolly (1983) dan S. Lukes (1974) menganggap kekuasaan sebagai sesuatu konsep yang dipertentangkan yang artinya merupakan hal yang tidak dapat dipercayai suatu konsensus.

OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT
(Haris Munanda, Effendi Hasan)

Menurut Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft und Gessellschaft* (1992) yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dan suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. Menurut Horal D. Laswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kea rah tujuan dari pihak pertama. Definisi lain diutarakan oleh Goodwin (2003), kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.

Perumusan yang umumnya adalah kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seseorang perilaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Dalam perumusan ini pelaku bisa berupa seseorang, sekelompok orang, atau suatu kolektivitas. Jadi, umpamanya A mempunyai kekuasaan atas B, jika A dapat menyebabkan B bertindak sesuai dengan keinginan A. dalam hal ini diasumsikan bahwa B sebenarnya mempunyai niat lain daripada yang dikehendaki A. kekuasaan selalu berlangsung antara sekurang-kurangnya dua belah pihak, jadi ada hubungan (*relationship*) antara dua pihak atau lebih

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dapil II Aceh Barat, dengan anggota legislatif terpilih dari dapil II yang terdiri dari Kecamatan samatiga, kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan bubon. Hal ini dikarenakan peneliti lebih memfokuskan pada aliran dana aspirasi anggota DPRK di Dapil II, dan dekat dengan daerah tempat tinggal peneliti. Proses pengumpulan data dilakukan dengantujuan untuk mendapatkan data (informasi) agar dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara objektif.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif memberikan kesempatan berekspresi dan penejelasan yang lebih besar. Riset kualitatif cenderung punya banyak kualitas yang “personable”. Artinya, kita dapat mengenal orang/kelompok orang yang kitariset, seringkali tingkat

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT**
(Haris Munanda, Effendi Hasan)

pengenalan kita melebihi dari yang semestinya dibutuhkan untuk proyekriset. Scofield menyatakan bahwa adalah dimungkinkan untuk mengembangkan konsep *generalisability* yang lebih cocok untuk riset kualitatif dibukukan berdsarkan kemudahan saja buahkan studi kualitatif terhadap beberapa tempat (multisite) telah banyak dilakukan sejak 1970an (Schofield, 20009: 92). Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu (Burhan, 2013: 48).

Data yang akan diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung kelapangan.
2. Sedangkan data sekunder didapat melalui buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan dari sumber yang berkaitan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Dana Aspirasi Anggota DPRK Dapil II Aceh Barat

Anggota DPRK yang telah terpilih setelah Pemilihan Umum pada tahun 2014 yang lalu, tentunya mempunyai trik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Untuk menjaga kepercayaan tersebut perlu kiranya untuk menjawab beberapa tuntutan dan keluhan dari masyarakatnya yang berasal dari Dapilnya masing-masing, dikarenakan anggota DPRK di Aceh Barat khususnya masih mengatnut sistem perwakilan rakyat, dimana para wakil rakyat mewakili sejumlah warga negara yang bertempat tinggal di suatu daerah atau distrik tertentu. Tentunya untuk mewujudkan kebutuhan yang disuarakan oleh para pemilih, para anggota dewan mengalokasikan dana aspirasi mereka untuk menjawab dan mengakomodir kebutuhan para pemilihnya.

Dana aspirasi DPRK ini bila dianalisa sangat mirip dengan '*pork barrel budget*' di Amerika Serikat (AS). Dana aspirasi DPRK tidak lain adalah politik *pork barrel* untuk menjaga status quo anggota DPRK dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang negara. Dana yang diusulkan dapat disebut

OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II ACEH BARAT

(Haris Munanda, Effendi Hasan)

dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Wakil rakyat memang sudah mendapat inspirasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi konstituennya. Sejalan dengan politik pencitraan maka aspirasi rakyat adalah yang paling kuat untuk menjadi alasan usulan tersebut. Dana yang diusulkan dapat disebut dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi wakil rakyat dalam memecahkan persoalan rakyat.

Ada berbagai macam alokasi dana yang dilakukan oleh anggota dewan untuk menjawab aspirasi rakyat. Pada tahun 2015 yang lalu, anggota DPRK Aceh Barat dari Dapil II mengalokasikan dana aspirasi mereka untuk pembangunan infrastruktur umum, dimana dengan pembangunan tersebut diharapkan dapat menjawab sedikit banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari Dapil II Aceh Barat tersebut. Secara perlahan namun pasti pembangunan terus coba digenjut para anggota legislatif dari Aceh Barat supaya pemerataan pembangunan dapat terwujud.

Kendala Dalam Mengoptimalisasi Dana Aspirasi

Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang datangnya dari lembaga legislatif itu sendiri. Adapun kendala internal yang dihadapi oleh anggota dewan adalah waktu yang cukup singkat untuk merealisasikan perencanaan yang matang. Hal ini disebabkan masa pengesahan anggaran yang lama tidak tepat di awal tahun, sehingga menyebabkan pengerjaan pembangunan ikut terlambat juga, karena harus melalui berbagai proses administrasi lainnya di setiap SKPD. Masalah ini tentunya menjadi kendala umum terhadap perencanaan jangka panjang, sehingga mengganggu menciptakan kondisi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada prinsipnya, *good governance* mengandaikan peran minimal negara (*less government*) dalam mengelola persoalan-persoalan publik. Negara dianggap sebagai biang masalah yang mengambat proses pembangunan sehingga perlu dikurangi perannya. Dengan demikian, negara hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Di sisi yang lain, peran masyarakat dan dunia usaha diperluas untuk mengimbangi peran negara yang sebelumnya sangat dominan. Pemerintah telah meletakkan *good governance* sebagai

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT**
(Haris Munanda, Effendi Hasan)

prioritas dan tujuan yang akan dicapai dalam proses transformasi bernegara. Dalam dokumen rencana pembangunan ditegaskan bahwa salah satu agenda utama pembangunan nasional adalah Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. Pemerintah telah meletakkan Reformasi Tata Kelola sebagai program prioritas utama dalam agenda pembangunan. Bahkan, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dijadikan sebagai prinsip utama yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan serta menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan.

Dalam dokumen tersebut dinyatakan: “Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan oleh sebuah negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.” Dalam konteks penganggaran, *good governance* ditandai dengan konsentrasi belanja publik pada barang-barang publik, termasuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah telah menempatkan reformasi anggaran sebagai bagian dari proses transformasi menyeluruh pada kehidupan bernegara.

Kendala Eksternal

Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Cara untuk menyelenggarakan kekuasaan berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh adalah kekerasan, akan tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang anggota dewan. Seorang penjahat dengan senjata celurit yang memaksa seseorang untuk menyerahkan miliknya merupakan sesuatu contoh dari kekuasaan yang paling terbuka dan brutal. Kekuasaan juga dapat dilakukan melalui koersi (*coercion*) yaitu melalui ancaman akan diadakannya sanksi. Mungkin para dewan memerlukan satu cara yang lunak untuk mendekati mereka dengan masyarakat pemilik tanah.

Suatu upaya yang sedikit lebih lunak yang peneliti maksud adalah, melalui persuasi (*persuasion*) yaitu proses meyakinkan, berargumentasi, atau menunjuk pada pendapat seorang ahli. Dalam kehidupan sehari-hari seorang pelaku berkuasa kadang-kadang cenderung memakai cara ini agar tidak menonjolkan kekuasaan untuk sementara, dikarenakan ditakutkan terkesan otoriter dan terlalu berkuasa, akan waktu tertentu nantinya kekuasaan dinampakkan pada khlayak ramai.

OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT
(Haris Munanda, Effendi Hasan)

Contoh diatas bisa dijadikan contoh oleh anggota Dewan Dapil II Aceh Barat dalam mengatasi masalah pembebasan lahan warga untuk pembangunan infrastruktur umum yang direncanakan. Menurut peneliti, pihak pelaksana pembangunan bekerjasama dengan dinas lain untuk memberikan keringan dari segi yang lain bagi warga yang bersedia membebaskan lahannya untuk pembangunan infrastruktur bangunan umum. Keringanan maksudnya disini adalah berupa penghargaan yang diberikan kepada warga yang dengan suka rela memberikan pembebasan lahan tanahnya dengan harga yang standar pemerintah atau harga standard di daerah tersebut, dengan ini bukan serta merta pemerintah bisa menggati rugi harga yang mereka suka, akan tetapi warga juga mempunyai hak dengan menghargakan dengan harga yang standar yang berlaku didaerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana aspirasi Tahun 2015 anggota DPRK Dapil II Aceh Barat sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur umum di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bubon dan Kecamatan Arongan Lambalek. Adapun pembangunan infrastruktur yang dibuat adalah drainase, membuat pagar masjid, tempat wudhu, lapangan bola, serta pelebaran jalan.
2. Masih ditemukannya kendala dalam mengoptimalisasi dana aspirasi di DPRK Dapil II Aceh Barat. Adapun kendalanya adalah; penyaluran pembangunan dari dana aspirasi tidak merata di semua kecamatan yang ada di Dapil II. Dari tiga kecamatan yang termasuk dalam Dapil II hanya Kecamatan Bubon dan Arongan Lambalek yang mendapatkan bantuan berupa pembangunan infrastruktur. Hal inidisebabkan oleh kurangnya data yang dimiliki oleh pengambil kebijakan, pembebasan lahan warga untuk pembangunan, serta masa waktu kerja yang sedikit.

5.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari deskripsi kesimpulan-kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT**
(Haris Munanda, Effendi Hasan)

1. Pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan untuk kemajuan dan kelancaran aktivitas warga sehari-hari, akan tetapi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah Dapil II juga harus diperhatikan, perlu kiranya dibuat sebuah pelatihan skill dan ekonomi mandiri warga untuk meningkatkan pembangunan.
2. Dalam membuat perencanaan pembangunan diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi administrasi seperti perizinan lahan, data lokasi pembangunan, peraturan yang baru, dan lain-lain ataupun dari segi operasional, seperti waktu yang dibutuhkan, bahan yang diperlukan dan lain-lain sehingga pembangunan tepat waktu dan lebih cepat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, M. Burhan. 2013. *Metode Penelitian dan Ekonomi*. Jakarta: Jakarta Kencana.
- Bogdan dan Taylor. 1982. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utomo, Muhajir. 2013. *Penelitian Bidang Kependidikan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Motede Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Rubbin, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Seidel, J. V. 1998. *Qualitative Data Analysis*.
- Schofield. 2009. *Methodology Analisis Data*. Jakarta: Kencana Media.

B. Skripsi

- Skripsi* (Ahzir Erfa, 2008) dengan judul “*Analisis Keuangan Pemerintah daerah Setelah Otonomi Khusus (Studi kasus Pada pemerintahan kabupaten Aceh utara)*”.
- Skripsi* (Ariyo Cahyo Nugroho, 2011) dengan judul “*Representasi Aspirasi Publik*”.
- Skripsi* (Amrin, 2015) dengan judul “*Aspirasi DPRD Kabupaten Gayo Lues Periode 2009-2014*”.

OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT
(Haris Munanda, Effendi Hasan)



C. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)

Tgk zulfikar, Effendi Hasan,(2018), *Politik Pengelola Keuangan Negara (Studi Penyebab Keterlambatan Pengesahan APBD Tahun 2016) Vol 3, No 2.*

Muhammad Qadafi, Radhi Darmansyah, Adwani (2016), *Tarik Ulur Kepentingan Dalam Proses Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Masa Jabatan 2014-2019, Vol 1, No 4.*

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II
ACEH BARAT**
(Haris Munanda, Effendi Hasan)